

## MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK YANG PROGRAMATIK

**Diah Setiawaty**

Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Program Officer

Voter Education and Information Perkumpulan untuk

Pemilu dan Demokrasi.

Email: [Diah@yahoo.co.id](mailto:Diah@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*Youth voters potential in Indonesia is quite large due to the significant number of voters. However, the potential of low level of political participation in society, especially among first-time voters are also predicted to increase with the increasing public apathy due to the poor performance of the elected government. Electoral education is a strategic mean to address these problems. Unfortunately since the beginning of the democratic election, after the new regime era, the Election Organizer (KPU) has not yet doing the electoral education and has been using the same programmatic approach which is voter information which only a temporary solution. Political parties also are still not up to running a electoral education functions as mandated by the law. It needs a mutual commitment from the government and political parties to involve all elements of society such as CSO and educational institutions to start doing programmatic electoral/voter education to improve not only the rate of voter participation in elections but also the overall political participation.*

**Keywords :** *electoral or voter education, voter information, voter participation, the election commission (KPU), political party.*

### **Abstrak**

*Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar seiring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Akan tetapi potensi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya di kalangan pemilih pemula juga diprediksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya apatisme publik dikarenakan kinerja pemerintah yang tidak memuaskan. Pendidikan pemilih adalah sebuah langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sayangnya penyelenggara pemilu dari setiap periode pemilu demokratis hingga saat ini masih belum melakukan pendidikan pemilih yang programatik dan masih menggunakan*

*pendekatan informasi pemilih yang merupakan solusi sementara. Partai politik juga masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi pendidikan politik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Perlu adanya komitmen bersama baik dari pihak pemerintah dan partai politik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti CSO dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mulai melakukan pendidikan pemilih yang programatik untuk meningkatkan tidak hanya angka partisipasi pemilih dalam pemilu tetapi juga partisipasi politik secara keseluruhan.*

**Kata kunci:** *pendidikan pemilih, informasi pemilih, partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik.*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia adalah jumlah pemilih pemula dan pemilih muda yang masih berusia produktif yang sangat besar. Bonus demografi ini jika dikaji dari sisi ekonomi, menurut laporan Penelitian Mc. Kinsey Institute akan membuat Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030, melewati Jerman dan Inggris, karena populasi pemuda yang menjaga produktifitas ekonomi Indonesia. Diperkirakan 70% dari populasi Indonesia adalah umur produktif yang berkisar di antara 15-64 tahun pada 18 tahun mendatang.<sup>1</sup> Jika dilihat dari sisi lain yaitu dari kaca mata politik menjelang pemilihan umum tahun 2014 ini maka dapat ditemukan hal yang serupa terkait dengan peran pemuda terutama pemilih pemula.

Sebetulnya siapakah yang disebut-sebut sebagai pemilih pemula itu? Pemilih pemula adalah orang-orang yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilih, purnawirawan atau mereka yang sudah tidak lagi bekerja sebagai anggota TNI atau Kepolisian. Untuk membatasi pembahasan dalam tulisan ini, konteks yang dimaksud sebagai pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali memilih, sedangkan

---

<sup>1</sup> Mc. Kinsey Global Institute, *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia Potentials*, (Mc.Kinsey&Company, 2012), hlm. 15.

yang dimaksud dengan pemuda atau pemilih muda di dalam tulisan ini merujuk kepada UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu mereka yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun.<sup>2</sup>

Sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 bahwa Kelompok usia produktif Indonesia jumlahnya begitu tinggi. Di dalamnya ada kelompok pemuda (UU No. 40 Tahun 2009, pemuda berusia 16-30 tahun). Berdasarkan sensus Penduduk kelompok usia 16-30 tahun (pemuda) sebesar 62.343.755 atau sebesar 26,23 % dari total penduduk (BPS, SP 2010)  $\pm 15\%$  Pemilih Pemilu 2014 adalah Pemilih Pemula.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan data yang dirilis Komite Pemilihan Umum (KPU) dari 186.612.255 orang penduduk Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 20-30% adalah pemilih pemula.<sup>4</sup> Dalam kaitannya dengan pemilu jumlah tersebut sangat besar dan dapat menentukan kemenangan sebuah partai politik. Sebagai ilustrasi, angka tersebut lebih dari dua kali lipat jumlah suara yang diperoleh Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 21.655.295 jiwa atau sekitar 20,81% tahun 2009.<sup>5</sup> Dari jumlah dalam data tersebut jika dikonversi menjadi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan asumsi satu kursi membutuhkan 250.000 suara setelah mempertimbangkan *parliamentary threshold*, adalah sebesar 240 kursi yang merupakan hampir setengah dari jumlah anggota DPR. Penjabaran angka statistik ini memperlihatkan betapa signifikan dan krusialnya peran pemilih pemula pada pemilu 2014 pada tanggal 9 April 2014 nanti dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Berdasarkan data di atas dalam tulisan ini akan diuraikan problem dan cara mengatasi partisipasi pemilih muda melalui pendidikan politik yang programatik. Agar tulisan ini sistematis dan kontekstual

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 UU. No. 40 tentang kepemudaan.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010. <http://sp2010.bps.go.id/>. Diakses pada 5 Maret 2014 Pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Buku Saku Pemilu 2009: Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2009), hlm. 41.

<sup>5</sup> Titi Anggraini dan Diah Setiawaty, *Kerangka Acuan - Jelang Pemilu 2014: Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula Di Sumatera Utara*, (Jakarta: Media Press, 2013), hlm. 1.

terhadap keindonesiaan, akan diuraikan terlebih dahulu pemetaan problem pemilu di Indonesia. Setelah itu, tawaran dari problem tersebut dijawab dengan menggunakan teori-teori politik dan membandingkannya dengan negara-negara lain yang sudah mapan dalam pemilu.

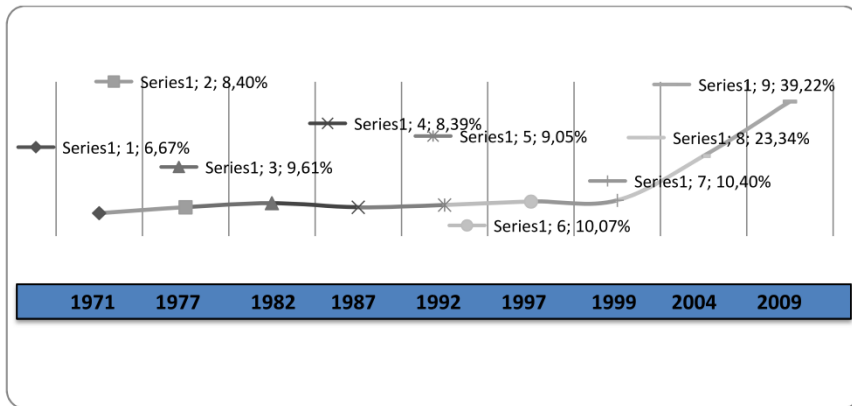
## **B. Masalah Partisipasi Pemilih di Indonesia**

Partisipasi politik yang tinggi di negara demokrasi pada umumnya dianggap baik karena menunjukkan bahwa warga negara aktif mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa rezim pemerintahan yang berjalan memiliki legitimasi yang tinggi. Bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur intensitasnya adalah persentase orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu (*voter turnout*) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.<sup>6</sup> Saat ini terjadi trend global penurunan partisipasi pemilih di seluruh dunia, tidak terkecuali di India, Amerika Serikat, Australia, dan terlebih lagi di Indonesia. Jika dihitung secara rata-rata partisipasi pemilih di Indonesia terus mengalami penurunan konsisten sebesar 10% dari tiga periode pemilu sejak pemilihan umum demokratis pertama kali diselenggarakan di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Hal ini terlihat melalui trend tingkat partisipasi pemilih dari angka 93% pada pemilu 1999 yang turun menjadi 84% pada pemilu 2004 dan terus turun ke angka 71% 2009. Sebagaimana yang tampak pada tabel berikut ini:

---

<sup>6</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik 2000*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabdi, 2012), hlm. 374.

Tabel 1. Angka Golput Pemilu Legislatif



Penurunan juga terjadi pada pemilu Presiden sejak dilakukan secara langsung pada tahun 2004. Pada pemilihan Presiden putaran pertama tahun 2004 angka pemilih yang tidak memberikan hak suara (golput) sebesar 21,77%, pada putaran kedua naik menjadi 23,37% sedangkan pada pemilu 2009 angka ini meningkat kembali hingga mencapai 23,37%. Sementara jumlah suara tidak sah terus menerus mengalami peningkatan dari 3,3 % pada pemilu 1999, menjadi 9,7 % pada pemilu 2004 dan melonjak menjadi 14,4 % dari pada pemilu 2009.<sup>7</sup>

Sayangnya tidak diketahui dengan pasti pembagian usia dari penurunan partisipasi ini, serta tidak juga diketahui dengan pasti pembagian kategori ini, merujuk pada terminologi Eep Saefulloh Fatah, persoalannya tidak jelas angka golput karena memang golput politis golput karena merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan atau golput ideologis, golput karena tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) ataukah karena golput teknis golput karena sebab-sebab teknis seperti keliru menandai surat suara atau berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) atau karena Golput teknis-politis: golput karena tidak terdaftar sebagai

<sup>7</sup> Widjanarko Puspoyo, "Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009", dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. I No. 63 Tahun 2009, hlm. 12.

pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) semata.<sup>8</sup> Beberapa ahli menyarankan adanya opsi golput di kertas suara agar dapat memperjelas apakah benar golput tersebut karena alasan ideologis dan politis atau karena masalah teknis belaka.

Penyebab turunnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari kurangnya pendidikan politik, masih banyaknya manipulasi dan politik uang, komitmen pemberantasan korupsi yang kurang, hingga ke masalah teknis dan administratif. Selain itu yang juga tidak kalah penting adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan karena terbukti setelah terjadi pemilu demokratis, kesejahteraan rakyat tidak juga meningkat, jika tidak bisa disebut tercapai.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) semakin rendahnya angka partisipasi politik disebabkan karena partai politik tidak memiliki program dan platform yang jelas antara partai yang satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya mereka hanya berburu rente, dan mendekati pemilih menjelang pemilu. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pemilih mudah berontak, tidak setia, dan kemudian mengakibatkan fluktuabilitas dukungan kepada partai-partai. Kendati saat pemilu digelar, para pemilih mengambang ini tetap menggunakan hak pilihnya akan tetapi biasanya itu karena terpaksa. Golput yang terus meningkat dikarenakan mereka tak kunjung menemukan partai alternatif yang kredibel.<sup>9</sup> Faktor ini bisa jadi adalah salah faktor determinan penyebab turunnya partisipasi pemilih dan penyebab munculnya beragam tipe pemilih seperti tipe pemilih skeptis, pesimis, apatis dan pragmatis.

Hal ini adalah respon yang wajar mengingat kondisi politik yang dihadapi oleh Indonesia saat ini yang menunjukkan hampir seluruh partai politik besar terjerat oleh Komite Pemberantasan Korupsi

---

<sup>8</sup> Husni Kamil Manik, *Presentasi Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2013*, Makalah disampaikan dalam Seminar Publik Perludem, Jumat 21 Februari 2014, hlm 12.

<sup>9</sup> Husein Harun, *Pemilu Indonesia (Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding)*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), hlm. 303.

(KPK) dalam perkara tindak Pidana Korupsi. Korupsi tersebut dilakukan oleh berbagai aktor yang berasal dari wakil-wakil partai politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Pada bulan Juni tahun 2013 lalu Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan memberikan pernyataan kepada media bahwa setidaknya ada tiga puluh enam calon legislatif (caleg) yang diragukan komitmen anti korupsinya.

Tiga puluh enam caleg ini tersebar dari setidaknya sembilan partai besar di Indonesia dan mencalonkan diri di 24 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu yang beberapa diantaranya adalah mereka yang pernah terlibat dan menerima sejumlah uang dalam kasus korupsi, pernah terpidana kasus korupsi, serta politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan yang pernah dijatuhi sanksi dalam pemeriksaan oleh badan kehormatan DPR.<sup>10</sup>

Kualitas yang buruk ini ditambah dengan *eksposure* media yang besar dan terus menerus terhadap berita-berita negatif terkait dengan politik dan pemerintahan. Paradigma yang menjadi landasan berpikir yang selalu digunakan oleh pers *mainstream* adalah *bad news is a good news* (berita buruk adalah berita baik), hal ini menyebabkan bertaburannya berbagai pemberitaan dengan sentimen negatif di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.

Ketidaknetralan pers di Indonesia juga menjadi pemicu berbagai ragam pemberitaan dan sentimen negatif terhadap partai politik, pemerintah dan juga kepada pers itu sendiri. Hampir seluruh media besar di Indonesia dimiliki oleh kandidat dari partai politik tertentu. Hal ini menyebabkan media massa gagal menjalankan fungsinya untuk melakukan literasi media dan meningkatkan sikap kritis masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam UU Penyiaran Media pasal 52 ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Indonesia Corruption Watch, *Presentasi: 36 Calon Sementara Anggota DPR RI yang Diragukan Komitmen Anti Korupsinya*, 28 Juni 2013, (Makalah tidak diterbitkan), hlm. 12.

“Literasi media adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Inti dari literasi media adalah pemberdayaan masyarakat untuk kritis atas tayangan media, terutama televisi (mengingat besarnya pengaruh TV).”

Pada akhirnya, sebagaimana yang diungkapkan Khrisna Sen dan David T. Hill di dalam buku *Media, Culture, and Politics in Indonesia* bahwa media massa Indonesia bukan menjalankan peran merefleksikan realitas tetapi merepresentasikan realitas. Media di Indonesia dengan mudah menjadi alat kepentingan kekuasaan untuk merumuskan realitas politik, kultural dan sosial Indonesia seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan seperti yang dialami rakyat banyak.<sup>11</sup>

Frase serangan udara yang dulu familiar di jagad politik sebagai bentuk strategi perang yaitu mengerahkan pesawat-pesawat ke sasaran tertentu di wilayah musuh sekarang menjadi tidak hanya iklan pencitraan partai, caleg, dan capres tertentu tetapi juga menembus *news room* (ruang berita) terutama ketika para konglomerat pemilik media penyiaran bukan hanya menjadi pemimpin perusahaan tetapi juga mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif. Penjelasan tentang ini bahkan pernah disampaikan oleh Wiranto, ketua umum dan calon presiden dari Partai Hanura dalam pernyataannya yang dikutip oleh Merdeka.com bahwa dengan dukungan Hary Tanoe, Hanura akan punya jatah iklan yang banyak di media massa. “*Ini namanya serangan udara’. Kita bersyukur cawapres kita punya pesawat udara yang dapat digunakan untuk ‘mengebom’*” kata Wiranto pada 21 Agustus 2013 lalu.<sup>12</sup>

Saat ini pemilih dapat melihat wajah Wiranto, Hary Tanoe, dan Partai Hanura di televisi-televisi milik MNC Group. Pasalnya Hary Tanoe yang juga masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah *Forbes*, itu adalah pemilik grup MNC yang memiliki jaringan

---

<sup>11</sup> Khrisna Sen dan David T.Hill, *Media, Culture, and Politics In Indonesia*, (London: Oxford University Press, 2000), hlm. 125.

<sup>12</sup> Husein Harun, *Pemilu Indonesia (Fakta, Angka...*, hlm. 142.



stasiun televisi, radio, media cetak, dan media online miliki grup MNC. Begitu pula dengan berbagai siaran televisi lainnya kita bisa melihat pidato-pidato Surya Paloh yang disiarkan dengan durasi yang tidak biasa di Metro TV bahkan sering kali diselingi iklan komersial, *breaking news*, serta ulasan khusus tentang kegiatan itu dari presenter kemudian dilanjutkan lagi dengan pidato politik yang sama. Situasi yang sama ditemukan di TV One, dalam mengusung calon Presiden Golkar Abu Rizal Bakrie yang juga memiliki stasiun televisi ini.

Sekelompok organisasi yang *concern* di isu pemilu dan demokrasi diinisiasi oleh Remotivi bahkan berinisiatif membuat petisi yang menuntut agar Komisi Penyiaran Indonesia bekerja untuk menghukum atau menindak partai politik yang menjadi pengabdikan partai politik dan menggunakan frekuensi publik, yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tindakan-tindakan seperti ini pada akhirnya menjadi terminologi baru yang disebut oleh Afdal Makkuraga Putra, mantan redaktur pelaksana Media Watch The Habibie Center sebagai “*Buying access to voter*” (membeli akses ke pada pemilih)<sup>13</sup>

Seiring dengan buruknya pemberitaan yang terjadi terus menerus, politik menjadi kian dianggap sebagai sebuah arena pertarungan kekuasaan yang kotor dan kejam yang di dalamnya manusia saling menjadi predator atau serigala bagi manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pribahasa Latin “*homo homini lupus*”. Politik pun diterima dan dimaknai secara kolektif oleh masyarakat di dalam bentuknya yang paling buruk yaitu perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*).<sup>14</sup>

Masalah lain yang juga merupakan unsur yang menentukan dalam turunnya partisipasi di dalam pemilu ini adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Elemen pendidikan politik ini ibarat sebuah koefisien dalam rumus matematika yang dapat mempengaruhi

---

<sup>13</sup> Husni Kamil Manik, Husein Harun, *Pemilu Indonesia (Fakta, Angka..)*, hlm. 144.

<sup>14</sup> Merkl K., *Continuity and Change*, (New York: Harper and Row, 1967), hlm. 13.

unsur-unsur lainnya, tidak hanya partisipasi politik tetapi juga kualitas dari para wakil rakyat dari dan di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Indonesia mungkin adalah negara yang memiliki kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia. Dengan empat juta petugas di 550.000 tempat pemungutan suara (TPS), yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 775 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 230.000 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah.<sup>15</sup> Hal ini menyebabkan publik begitu berjarak dengan kegiatan pemilu dan menganggapnya sebagai even lima tahunan semata. Hal ini juga adalah tantangan besar bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan, sosialisasi dan informasi kepada segenap rakyat Indonesia karena tanpa adanya pendidikan pemilih yang baik sulit bagi masyarakat untuk mengetahui apa urgensi memilih, bagaimana cara menjadi pemilih cerdas dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih seorang kandidat.

Di lain sisi, pendidikan pemilih yang buruk di dalam tubuh partai politik mengakibatkan buruknya kaderisasi partai. Masih banyak partai politik tidak mempunyai mekanisme kaderisasi yang baik dan berkelanjutan. Tidak jarang pula kader dalam partai hanya diletakkan sebagai pekerja yang khusus mencari 'kader lain' untuk kepentingan kemenangan pemilihan umum. Sehingga partai memilih wakil-wakilnya yang duduk di dalam parlemen bukan berdasarkan kualitas, kompetensi, komitmen dan loyalitas caleg terhadap partai melainkan berdasarkan hitung-hitungan transaksional dan pragmatis semata. Ini bisa dilihat dari maraknya para artis yang *notabene* terkenal dicalonkan menjadi caleg di semua partai yang bertarung pada tahun 2014 ini. Tidak itu saja, bahkan calon Presiden pun ada yang dari kalangan penyanyi. Tentu saja ini adalah hal yang sah dalam negara yang menganut sistem demokrasi, akan tetapi perlu dibarengi dengan bekal

---

<sup>15</sup> Rumah Pemilu, *Gambaran Singkat Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rumah Pemilu Press, 2013), hlm. 5.

pengetahuan yang cukup dan juga kontribusi nyata ketika mereka menjabat sebagai pejabat publik atau menjadi legislator.

### **C. Pendidikan Pemilih: Perbandingan Indonesia dengan Negara Lain**

Berbicara tentang pendidikan pemilih, perlu untuk dibedakan antara pendidikan kepemiluan (*Electoral Education*) dan informasi pemilih (*Voter Education/Awareness*). Tentunya keduanya saling mendukung, dan pendidikan pemilih seharusnya merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas serta bagian dari berbagai aktivitas yang mendukung demokrasi. Pendidikan pemilih bersifat lebih panjang, terstruktur dan terprogram dengan baik. Terminologi pendidikan pemilih ini terkait erat dengan peserta/audience, pesan, pendekatan, waktu, dan mandat secara institusional<sup>16</sup>.

Untuk membahas satu persatu ada baiknya kita memulai dengan membahas keseluruhan yang saling terkait ini yaitu pendidikan kewarganegaraan, informasi pemilih, dan terakhir pendidikan pemilih. Elaborasi lebih dalam mengenai ketiga macam elemen ini dibutuhkan untuk dapat membedakan secara substansial terminologi-terminologi yang sering kali digunakan tetapi gagap dalam penggunaannya karena kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan konsep-konsep yang lebih luas yang mendukung masyarakat demokratis seperti peran masing-masing dan tanggung jawab warga negara, pemerintah, kepentingan politik dan khusus, media massa, dan sektor bisnis dan non -profit, serta pentingnya pemilu yang periodik dan kompetitif. Ini menekankan tidak hanya kesadaran warga negara tetapi partisipasi warga dalam semua aspek masyarakat demokratis. Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses yang berkelanjutan, tidak terikat dengan siklus pemilu dan dapat dilakukan melalui sistem sekolah dan

---

<sup>16</sup> *The Electoral Knowledge Network. Civic and Voter Education.* <http://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vea>. Diakses 19 April 2014 pukul 08.22 WIB.

Universitas. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah terutama di sekolah sejak Sekolah Dasar hingga Universitas. Dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 dikemukakan bahwa

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata Pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.

Tujuan ini dalam konteks SD misalnya meliputi cakupan-cakupan sebagaimana berikut: Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak sekali yang coba diajarkan sejak SD terkait pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan, pendidikan politik juga sudah dielaborasi di SMA dapat dilihat dalam kurikulum bahwa sistem politik, budaya politik, dan peranan pers dalam demokrasi di Indonesia sudah diajarkan dalam kurikulum 2013.<sup>17</sup> Walau demikian hingga SMA dan Universitas tidak ada

---

<sup>17</sup> *Kurikulum Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah Atas*. <https://docs.google.com/document/d/1ckJunATN5haprrgWb6KpaGeISd68y6atfquHNZGWDgg/edit>. Diakses pada 19 April 2014 pukul 21.00 WIB.

pembahasan tentang pemilu lebih khusus dan lanjut dalam pendidikan kewarganegaraan.

Berbeda dengan informasi pemilih yang biasanya dilakukan hanya menjelang pemilu dan menyediakan informasi dasar seperti bagaimana cara memilih, waktu memilih, lokasi dan tempat memilih. Informasi pemilih biasanya tidak membutuhkan banyak penjelasan tentang konsep pemilu dan demokrasi itu sendiri. Pendidikan pemilih atausering disebut *electoral education/voter education* selayaknya tidak hanya dilakukan kepada setiap warga negara yang memiliki hak pilih tetapi juga kepada mereka yang akan memiliki hak pilih seperti siswa-siswi di bawah usia 17 tahun.

Informasi pemilih merujuk kepada berbagai informasi yang membantu warga negara untuk memilih, termasuk tanggal, waktu, dan tempat untuk voting; tipe pemilihan umum, berbagai informasi yang dapat membantu melakukan identifikasi kelayakan, informasi mengenai pendaftaran pemilih dan mekanisme untuk melakukan pemilihan suara termasuk berbagai fakta-fakta dasar tentang pemilu yang tidak membutuhkan konsep yang terlalu rumit tentang pemilu. Aktivitas-aktivitas ini bersifat periodik dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Informasi Pemilih dan pendidikan pemilih, dapat menjadi bagian dari upaya pendidikan kewarganegaraan yang lebih besar. Walau demikian pendidikan *civic* atau kewarganegaraan dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat sipil, serta beberapa lembaga negara yang terkait yang tidak selalu otoritas penyelenggara pemilu.

Pengajaran pendidikan pemilih di sekolah akan berdampak baik karena akan membantu dalam mempersiapkan murid-murid untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan mengenai kepemiluan juga akan membantu dalam membekali calon pemimpin masa depan dengan pengetahuan yang memadai, terutama untuk mengetahui lebih banyak tentang tugas, tanggung jawab dan hak-hak sebagai warga negara. Selain itu ketika pendidikan pemilih diajarkan di sekolah-sekolah, ilmu pengetahuan ini juga akan membantu dalam

membangun kepercayaan terhadap negara, menciptakan kesadaran yang akan mendorong perubahan sikap, meningkatkan partisipasi aktif dalam pemerintahan, dan yang tidak kalah penting pengetahuan tentang pemilu ini akan membantu dalam mencegah atau mengendalikan kekerasan pada pemilu atau setelah pemilu yang biasanya terjadi di Indonesia.<sup>18</sup>

Sebaliknya informasi pemilih hanya menekankan kepada pemberian-pemberian informasi terkait pemilu menjelang pemilihan suara, seperti informasi teknis cara mencoblos, informasi tentang kandidat, informasi mengenai surat suara, dan lain sebagainya. Kegiatan pemberian informasi pemilih ini juga biasa dilakukan secara programatik menjelang pemilu dalam bentuk pertemuan publik, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya.

Terkait informasi pemilih, sebenarnya sudah banyak inisiatif untuk melakukan hal ini baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembagan non pemerintah seperti LSM. Dapat dilihat pada pemilu legislatif 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mencoba untuk menarik partisipasi masyarakat untuk melakukan diseminasi informasi politik melalui beberapa program mereka antara lain: Iklan di Media Massa dan pengembangan website KPU termasuk pembuatan API KPU yang baru diluncurkan menjelang pemilu legislatif, kerja sama dengan forum rektor Indonesia, kegiatan KPU Goes to Campus, Jalan Sehat dan Senam Sehat, serta program relawan demokrasi yang terutama ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda untuk memilih.<sup>19</sup> Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga melakukan hal serupa dengan fokus lebih kepada menarik partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu melalui kegiatan Sejuta Relawan.

Program informasi politik juga dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat terutama menyasar kepada generasi muda. Yang menarik dari program-program ini adalah pendekatannya yang tidak

---

<sup>18</sup> Rumah Pemilu, *Gambaran Singkat Pemilihan...*, hlm. 5.

<sup>19</sup> Husein Harun, *Pemilu Indonesia (Fakta, Angka...*, hlm. 142.

konvensional. Sebagai contoh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaksanakan pekan film pemilu yang diselingi dengan diskusi film untuk menarik minat generasi muda. Ada juga kelompok-kelompok anak muda seperti Ayo Vote, Parlemen Muda, Celup Kelingking, IngetNyoblosCuy yang biasa melakukan diskusi tentang pemilu baik melalui roadshow, dari mal ke mal, dan dari café ke café.

Inisiatif informasi pemilih yang tidak kalah menariknya yang baru terjadi pada tahun 2014 ini adalah terkait dengan Informasi dan Komunikasi Teknologi. Aliansi Jurnalis Indonesia bekerjasama dengan berbagai LSM meluncurkan program Mata Massa yaitu aplikasi untuk memantau pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Masyarakat Jabodetabek dapat mendaftar, memfoto bentuk pelanggaran, dan akan diproses oleh tim verifikasi Mata Massa. Program lainnya adalah program Perludem yaitu API Pemilu yaitu program pembuatan pusat data pemilu dengan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (*application programming interface*) sehingga data-data tersebut dapat dengan mudah digunakan oleh para *developer* dan *prgramer* IT untuk membuat aplikasi-aplikasi handphone. Hasilnya sudah banyak anak muda Indonesia yang membuat aplikasi-aplikasi pemilu di handphone berbasis *platform* Android dan IOS yang dapat dengan mudah memberikan informasi seperti profil caleg, informasi dapil, visi-misi partai, pertanyaan-pertanyaan dan regulasi seputar pemilu. Aplikasi ini cukup membantu dalam memberikan informasi pemilu, terutama kepada generasi muda yang melek teknologi dan juga terbiasa dengan media sosial. Perludem mengumpulkan aplikasi-aplikasi ini di dalam webnya, <http://pemiluapps.org>.

Meskipun Indonesia terbilang sudah cukup maju dalam hal pemberian informasi pemilih, Sayangnya informasi pemilih ini masih minim dan belum merata. Sebagai contoh, di wilayah DKI Jakarta, *survey on-line* yang dilakukan oleh Indocratia dan Perludem menunjukkan bahwa hanya 32 % dari pemuda Jakarta yang tahu

kapen pemilu legislatif akan dilaksanakan dan hanya 69% dari 32% itu yang menjawab dengan benar<sup>20</sup>.

Survey lainnya yang dilakukan oleh Asia Foundation bersama dengan Polling Center untuk penelitian: Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi dan Praktik Pemilih Terkait Dengan Aspek Pemilu di Enam Target Propinsi di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Menunjukkan bahwa terdapat 25,4% pemilih tidak memilih pada pemilu 2009 karena mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang pemilu.<sup>21</sup> Padahal informasi tentang kapan pemilu diselenggarakan adalah informasi dasar yang harus disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu. Sedangkan Jakarta adalah Ibu kota dengan akses informasi yang relatif besar dan mudah tetapi jumlah yang kecil tersebut adalah sebuah pertanda, jangan-jangan memang sosialisasi atau informasi pemilih masih sangat kurang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Berbeda dengan program-program informasi pemilih. Program pendidikan pemilih juga sangat minim kalau tidak bisa disebut tidak ada. Pada kenyataannya pendidikan ketatanegaraan di SMA tidak diintegrasikan dengan penjelasan lebih lanjut mengenai kepemiluan. Sekali lagi walaupun ada pendidikan pemilu di sekolah-sekolah sifatnya hanya parsial dan tidak dilakukan secara konsisten melainkan hanya ketika menjelang pemilu. Pendidikan mengenai pemilu ini juga tidak diintegrasikan ke dalam kurikulum.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki struktur pendidikan politik yang sudah terprogram, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). Pihak KPU sampai saat ini pun belum selesai membahas bentuk pendidikan politik yang tepat

---

<sup>20</sup> Indocratia dan Perludem. *Survey Pemuda Pada Tahun 2013*, (Makalah Tidak diterbitkan), hlm. 21.

<sup>21</sup>The Asia Foundation. *Laporan Naratif Propinsi-propinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi, dan Praktik Pemilih Terkait dengan Aspek Pemilu di Enam Target Propinsi*. (Jakarta: Polling Center, 2008), hlm. 41.



yang harus diberikan kepada masyarakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu sampai saat ini tidak ada pendekatan programatik dalam melakukan pendidikan pemilih.

Terdapat beberapa negara yang sudah memiliki pendidikan politik yang cukup maju. Sebagai contoh, adalah pendidikan politik yang terjadi di Australia. Posisi penyelenggara pemilu di negara yang menganut sistem pemilu preferenial ini sangat besar, mereka tak hanya terlibat dalam pendidikan pemilih saja namun juga melakukan pendidikan politik kewarganegaraan. *Australian Electoral Commission* atau Komisi Pemilihan Umum Australia berusaha untuk dapat menjalin sebuah hubungan yang erat dengan *voter*. Salah satu program mereka adalah menjalin hubungan dengan masyarakat asli Aborigin melalui program Indigenous Electoral Participation Program yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga proses pendidikan pemilih merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan.<sup>23</sup>

Untuk pendidikan politik lewat program ke sekolah-sekolah AEC mencanangkan program *Get Voting* yang juga memberikan asistensi untuk pemilihan umum di sekolah. Petugas-petugas AEC juga mendatangi sekolah-sekolah ini untuk memberikan pendidikan pemilih yang terpadu dengan mengkolaborasi pendidikan pemilih dan kurikulum kewarganegaraan. Di dalam websitenya yang ramah terhadap pengguna (*user friendly*) AEC memberikan instruksi lengkap bagaimana cara menyelenggarakan pemilu di sekolah dalam lima tahapan mulai dari 1) perencanaan dan nominasi, 2) persiapan

---

<sup>22</sup> Rumah Pemilu, *Pendidikan Pemilih di Indonesia tidak sebaik di Australia dan India*, <http://www.rumahpemilu.org/read/4793/Pendidikan-Pemilih-di-Indonesia-Tak-Sebaik-di-Australia-dan-India>. Diakses pada 1 Maret 2014, pukul 11.22 WIB.

<sup>23</sup>Cate Thompson Presentation. Australian Electoral Commission. Dalam Seminar Publik Peningkatan Partisipasi Presentasi Masyarakat dalam Pemilu. <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4826/Materi-Seminar-Publik-Presentasi-Peningkatan-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pemilu-2014->. Diakses 17 April 2014, pukul 07.00 WIB.

sebelum pemilu. 3) pendidikan pemilih dan kampanye, 4) voting, 5) dan penghitungan suara.<sup>24</sup>

Terdapat bagian menarik yaitu bahwa di dalam tahapan ini pendidikan pemilih sendiri juga dimasukkan sebagai bagian dalam tahapan pemilu. Sehingga di dalam pendidikan pemilih berupa pemilu sekolah ini mereka juga diajarkan bagaimana melakukan pendidikan pemilih kepada teman-temannya melalui diskusi dan debat. Hal ini merupakan sebuah pembelajaran melakukan pendidikan politik dan pembelajaran terhadap budaya politik di Indonesia.

Kampanye pemilihan umum terhadap kelompok pemilih pemula dan pemilih muda juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook dan twitter. Dengan cara ini pemilih yang belum terdaftar dapat memilih dengan mudah mendaftarkan diri melalui sosial media dan juga dapat menyebarkan informasi tersebut ke teman-temannya sesama pemilih muda dan pemilih pemula. Selain itu salah satu hal yang tidak luput dielaborasi adalah pertanyaan-pertanyaan seputar regulasi dan pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh para pemilih.

Selain itu negara yang sudah cukup maju dalam melakukan pendidikan politik ini adalah di India. Negara yang mulai menggunakan teknologi E-Voting sejak tahun 1999 merupakan salah satu negara yang memiliki penyelenggaraan pemilu yang sangat rumit, bersaing dengan kerumitan pemilu di Indonesia. Pemilu di India merupakan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia dengan jumlah pemilih mencapai sekitar 720 juta dan tingkat voter turnout mencapai 420 juta pemilih<sup>25</sup> Mereka juga memiliki cara tersendiri untuk melakukan pendidikan politik. Di India upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih menggunakan *Systematic Voter's Education and Electoral Participation* (SVEEP) yaitu yaitu pendidikan

---

<sup>24</sup> *Australian Election Commission. 5 Steps on Running the Election*, [www.education.aec.gov.au/getvoting](http://www.education.aec.gov.au/getvoting). Diakses pada 19 April 2014 pukul 21:32 WIB.

<sup>25</sup> Rout Akshay. *Election Commission of India. Systematic Voter Education and Electoral Participation presentation*. Pada Seminar Publik Peningkatan partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014. (makalah tidak diterbitkan), hlm. 23.

pemilih dan partisipasi pemilu yang sistematis, bekerja sama dengan civil society, institusi pendidikan dan relawan dari golongan muda untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih.<sup>26</sup>

SVEEP diadopsi pada tahun 2009 dengan tujuan meningkatkan partisipasi publik pada proses elektoral di India. SVEEP juga bertujuan untuk memastikan semua orang India terdaftar dan dapat didatangkan ke TPS. SVEEP menasar kepada beberapa spesifik target yang diajukan pemerintah seperti kepada kelompok perempuan, anak muda, urban, kelompok lemah, mereka yang memiliki keterbatasan fisik dengan strategi mereka yaitu memberikan Informasi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam informasi pemilih ini adalah sebuah pendekatan yang disebut IMF (Information, Motivation, and Facilitation) memberikan informasi, motivasi, dan fasilitasi. *Information and motivation* yang disajikan meliputi berbagai macam informasi tentang cara mendaftar dan cara memilih. Begitu pula tentang motivasi yang menggugah pemilih mengenai alasan kenapa seseorang harus terlibat langsung dalam pemilu dan kenapa seseorang pada akhirnya harus memilih.

Di dalam prosesnya SVEEP telah berhasil mengurangi masalah voter dengan cara mengurangi gap atau jurang ketimpangan gender serta memberikan fasilitasi terhadap perempuan pada saat hari H pemilihan umum. Para penyuluh dari SVEEP juga senantiasa membawa berbagai alat peraga serta material advokasi yang biasa digunakan untuk kelompok perempuan, sebagaimana yang terdapat di dalam gambar di bawah ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Election Commission of India dan SVEEP (Systematic Voter Education and Electoral Participation*. [http://eci.nic.in/eci\\_main1/sveep.aspx](http://eci.nic.in/eci_main1/sveep.aspx). Diakses pada 1 Maret 2014 pukul 12.00 WIB.

<sup>27</sup> *Ichal Supriadi. Presentasi Asian Network for Free Election. 2014. Effort to Increase a Public Participation on Elections Notes and Study Case. Pada Seminar Publik Peningkatan partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014, (Makalah tidak diterbitkan), hlm. 34.*



Sedangkan untuk sasaran terhadap anak muda, SVEPP telah melakukan berbagai usaha yang diintegrasikan dengan program di Universitas. Yang menarik dari usaha pemerintah India, dalam hal ini diwakili oleh KPUnya mengeluarkan apa yang disebutnya sebagai duta kampus atau biasa disebut sebagai (*campus ambassador*). Duta kampus ini yang kemudian bertanggung jawab penuh dalam memberikan berbagai informasi pemilihan termasuk mengenai pendaftaran pemilih. Untuk mereka yang baru berumur 18 dan 19 tahun SVEPP menyelenggarakan satu even bernama young voters festival yang diisi kegiatan-kegiatan menarik seperti konser musik, seminar, debat dan diskusi.

Pendidikan politik yang programatik berarti adanya pendidikan politik di segala bidang dan tidak melulu harus melalui pendidikan politik yang sifatnya scholastik, sebagaimana yang terjadi di Australia dan India. Pada pendidikan politik yang menyasar kepada kelompok urban SVEPP bekerja sama dengan lokal NGO di sana. Beberapa perusahaan juga ikut serta untuk membantu dalam mensukseskan program tersebut melalui sikap kooperatif mereka untuk mendaftarkan seluruh karyawan mereka.

SVEPP India juga menjangkau kelompok minoritas seperti pekerja seksual, kelompok-kelompok tunawisma, serta kelompok yang hidup dengan disabilitas. Tidak sampai di situ mereka juga melakukan inklusi

ke kelompok-kelompok masyarakat adat. Mengingat dari banyaknya suku bangsa yang juga tinggal di India. Hal ini dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan NGO yang fokus di isu-isu masyarakat adat.

Selain penyelenggara pemilu pihak yang wajib melakukan pendidikan politik di Indonesia antara lain adalah partai politik. Bahkan partai politik mendapatkan subsidi dari negara untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh tentunya bermanfaat bagi partai politik itu sendiri sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini karena di setiap partai politik tentunya dibutuhkan kader-kader yang berkualitas. Kewajiban ini bahkan tertuang di dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik yang menjelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana: 1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara, 2) Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>28</sup>

Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012, di antaranya:

1. Pasal 2 Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>28</sup> Penjelasan lain juga terdapat dalam Anggaran dan Pendidikan Politik UU No.2 Tahun 2008 Jo UU No.2 Tahun 2011, Pasal 2 ayat 4 AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: (k) pendidikan politik, Pasal 34 ayat 3 a Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat, Pasal 34 ayat 3b Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

2. Pasal 9 ayat (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD. (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali partai lebih mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan oleh partai bisa jadi adalah loyalitas kepada partai melebihi loyalitas kepada negara sehingga sangat mungkin ia akan mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit.<sup>29</sup> Harun Husein, dalam bukunya *Fakta, Angka, Analisis* dan studi banding menyebutkan bahwa fungsi partai cenderung tidak fungsional lagi sehingga kaderisasi dan pendidikan politik mandeg. Harun mengutip Ari Dwipayana yang menyebutkan bahwa sebetulnya lewat jalur itulah, partai politik bisa berharap menangguk pemilih loyal yang bisa menjamin stabilitas dan kontinuitas dukungan.<sup>30</sup>

Di Indonesia, pada praktiknya partai politik masih sangat lemah dalam melakukan pendidikan politik. Ini terlihat dari masih banyaknya partai yang belum melakukan pendidikan politik secara terstruktur, sistematis dan masif terhadap kader-kadernya, apalagi terhadap masyarakat awam dan pemilih pemula. Ketika partai mendekati pemuda dan pemilih pemula pun pendekatan yang digunakan masih

---

<sup>29</sup> Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabdi, 2010), hlm. 408.

<sup>30</sup> Husein Harun, *Pemilu Indonesia (Fakta, Angka...*, hlm. 311.

sekedar mobilisasi ketimbang kaderisasi. Sangat disayangkan jika sampai saat ini masih ada partai politik melihat para pemuda dan pemilih pemula sebagai objek untuk dimenangkan ketimbang subjek yang harus dibina untuk bersama-sama membangun baik partai maupun bangsa dan negara. Ini terlihat dari banyaknya partai politik yang belum melakukan “jemput bola” memberikan pendidikan atau informasi pemilih kepada pemilih muda dan pemula dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan teknis terkait anggaran atau alasan yang lebih pragmatis.

Hal ini menyebabkan tidak hanya pendidikan pemilih di kalangan pemilih pemula dan muda menjadi terhambat tetapi juga oligarki partai semakin mengental dan pemuda menjadi sangat jauh dengan kegiatan politik dan juga kegiatan kepartaian. Survey kecil yang dilakukan Perludem dengan Indocratia misalnya, menunjukkan bahwa pemuda di Jakarta saja menunjukkan bahwa pemuda yang sebagian besar berusia 21-23 83% tidak memiliki kartu anggota partai dan 66% tidak pernah menghadiri acara partai sama sekali.<sup>31</sup>

Berkaca dari berbagai persoalan-persoalan dalam pendidikan politik di atas maka KPU sebagai organ inti penyelenggaraan pemilu harus mulai menentukan sebuah bentuk pendidikan politik yang programatis dalam arti terstruktur, sistematis, masif dan melibatkan berbagai kalangan termasuk institusi pendidikan. KPU sudah harus mulai terlepas dari paradigma informasi pemilih tetapi harus sudah mulai masuk ke dalam bentuk yang orientasi lebih ke jangka panjang yaitu pendidikan pemilih (*voter education*).

Di sisi lain partai politik juga diharapkan dapat terus melakukan pendidikan pemilih sesuai dengan mandat yang diamanahkan oleh UUD 1945. Ini dikarenakan ketika pendidikan pemilih berjalan baik partai politik sendiri yang akan memetik buahnya dari kerja kerasnya tersebut dengan munculnya kader-kader muda baru yang berkualitas dan dapat meningkatkan citra partai politik sendiri di hadapan masyarakat. Hal ini sudah terlihat melalui beberapa fenomena yang

---

<sup>31</sup> Indocratia. *Presentasi: Survey Pemuda 2013*, (makalah tidak diterbitkan), hlm. 13.

terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Ketika partai politik dapat mencetak kader-kader yang baik, berdedikasi dan dapat membuat perubahan di mata masyarakat maka kemungkinan besar partisipasi publik juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas dan elektabilitas kandidat kader-kader tersebut.

#### **D. Penutup**

Besarnya jumlah pemilih pemula di Indonesia pada pemilu 2014 ini dapat menjadi sebuah potensi yang besar untuk perbaikan masa depan bangsa Indonesia. Di dalam konteks partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih Indonesia memiliki tantangan untuk menurunkan tingkat potensi golput secara umum maupun dari golongan pemilih pemula dan pemilih muda. Potensi ini kian meningkat secara konstan rata-rata 10% setiap periode pemilu semenjak dilaksanakannya pemilu demokrasi pertama di masa orde baru. Berjaraknya masyarakat dengan pemilu dikarenakan pemberitaan negatif, pers yang partisan serta buruknya performa para wakil rakyat seiring dengan tidak maksimalnya fungsi partai dalam kaderisasi dan pendidikan politik disinyalir menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu.

Jarak yang besar ini juga dikarenakan kurang atau tidak adanya pendidikan pemilih yang programatik dari KPU sendiri. Selama ini kerja-kerja sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat kepada informasi pemilih alih-alih pendidikan pemilih. KPU masih lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya sosialisasi dan mobilisasi sosial melalui pemanfaatan media massa untuk menjangkau pemilih secara massif, sosialisasi dengan basis komunitas seperti tukang ojek, serta kerjasama dengan NGO. Akan tetapi sayangnya KPU belum membuat formulasi dari konsep dan kurikulum terpadu dari pendidikan politik itu sendiri.

Permasalahan-permasalahan di dalam pemilu tidak dapat diselesaikan dengan formula tunggal yang berlaku untuk setiap daerah. Akan tetapi salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi



permasalahan ini adalah melakukan pendidikan pemilih yang programatik dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan institusi pendidikan. Pendidikan politik ini memang sebaiknya mulai diinisiasi oleh penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan berbagai unsur dan juga menyesuaikan dengan konteks lokal perdaerah. Akan tetapi tentunya permasalahan pemilu bukanlah pekerjaan rumah dari penyelenggara pemilu saja. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dari setiap stakeholder terutama dari partai politik yang memang memiliki mandat dari pemerintah untuk melakukan pendidikan politik. KPU sebagai aktor utama selayaknya berkoordinasi dengan setiap stakeholder dan juga menggiatkan lagi keikutsertaan atau partisipasi masyarakat sesuai dengan definisi Peraturan KPU No. 23 tahun 2013.

Selain itu KPU harus mulai fokus untuk menjaring pemilih muda dan pemilih pemula, tidak hanya melalui pendidikan tetapi juga melalui teknologi informasi, internet, dan sosial media. Hal ini karena jumlah pengguna internet dan pengguna smartphone di Indonesia yang terus meningkat. Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia memprediksikan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 82 juta.<sup>32</sup> Pemanfaatan akses internet ini terutama dimanfaatkan oleh generasi muda yang juga melek dengan media sosial. Jakarta saat ini sudah seperti Ibukota dari sosial media. Sebagai kota teraktif di twitter, Indonesia juga mendapatkan peringkat teraktif nomor empat di facebook. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan pendidikan dan informasi pemilih yang menggunakan pemanfaatan teknologi seperti pembuatan *Application Programming Interface* untuk semua data-data KPU sehingga data-data tersebut dapat digunakan menjadi aplikasi mobile merupakan langkah yang bagus dan harus terus dikembangkan.

---

<sup>32</sup> 2013 *Pengguna Internet di Indonesia Bisa Tembus 82 Juta*. <http://tekno.kompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013.pengguna.internet.indonesia.bisa.tembus.82.juta>. Diakses tanggal 20 April 2014 pukul 3.42 WIB.

Dengan adanya program pendidikan pemilih yang sistematis, terstruktur dan masif ditunjang dengan adanya informasi pemilih yang intensif menjelang pemilihan umum. Maka pendekatan terstruktur yang ditujukan kepada calon pemilih secara keseluruhan ini akan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi pemilih, sehingga khususnya pemilih pemula dapat menentukan pilihan dengan rasional dan kritis.

### Daftar Pustaka

- Akshay,Rout. *Presentation Election Comission of India. Systematic Voter Education and Electoral Participation presentation*. Pada Seminar Publik *Peningkatan partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014*. (Makalah tidak diterbitkan). Disampaikan dalam Seminar Publik Perludem. Jumat, 21 Februari 2014.
- Anggraini, Titi dan Diah Setiawaty. 2013. *Kerangka Acuan - Jelang Pemilu 2014: Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula di Sumatera Utara*. Jakarta:Media Press.
- Australian Election Comission. 5 Steps on Running the Election.education.aec.gov.au/getvoting. Diakses pada 19 April 2014 pukul 21:32 WIB
- Badan Pusat Statistik. Sensus Penduduk 2010. <http://sp2010.bps.go.id/>. Diakses pada 5 Maret 2014. Pukul 13.00 WIB.
- Budiardjo Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Election Comission of India dan SVEEP Systematic Voter Education and Electoral Participation. [http://eci.nic.in/eci\\_main1/sveep.aspx](http://eci.nic.in/eci_main1/sveep.aspx). Diakses pada 1 Maret 2014. pukul 12.00 WIB.
- Electoral Knowledge Network. Civic and Voter Education*. <http://aceproject.org/ace-en/topics/ve/vea> diakses pada tanggal 19 April 2014. Pukul 8:22 WIB.
- Husein, Harun, 2014. *Pemilu Indonesia. (Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding)*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
- IDEA.2014. *The concepts of Civic Education. Electoral Education and Voter Awareness*. 1 Maret 2014. (Makalah tidak diterbitkan).
- Indocratia dan Perludem. 2013. *Presentasi: Survey Pemuda 2013*. makalah tidak diterbitkan.
- Indocratia dan Perludem. 2013. *Survey Pemuda PadaTabun 2013*. (Makalah Tidak diterbitkan).

- Indonesia Corruption Watch. 2013. *Presentasi: 36 Calon Sementara Anggota DPR RI yang Diragukan Komitmen Anti Korupsinya*. 28 Juni 2013. Makalah tidak diterbitkan.
- K., Merkl. 1967. *Continuity and Change*. New York: Harper and Row.
- Komisi Pemilihan Umum. 2009. *Buku Saku Pemilu 2009: Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Kurikulum Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah Atas. <https://docs.google.com/document/d/1ckJunATN5haprrgWb6KpaGeISd68y6atfquHNZGWDgg/edit>. Diakses tanggal 19 April 2014 pukul 09.34 WIB.
- Manik, Husni Kamil. *Presentasi Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2014*. Disampaikan dalam Seminar Publik Perludem, Jumat 21 Februari 2014. (Makalah tidak diterbitkan)
- Mc. Kinsey Global Institute. 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia Potentials*. London: Mc.Kinsey&Company.
- Miriam, Budiardjo. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik 2000*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabdi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012.
- Rumah Pemilu. 2013. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rumah Pemilu Press.
- Rumah Pemilu. *Pendidikan Pilih di Indonesia tidak sebaik di Australia dan India*. <http://www.rumahpemilu.org/read/4793/Pendidikan-Pemilih-di-Indonesia-Tak-Sebaik-di-Australia-dan-India>. Dikases pada 1 Maret 2014. pukul 11.22 WIB.
- Sen, Khrisna dan David T.Hill. 2000. *Media. Culture. and Politics In Indonesia*. London: Oxford University Press.
- Supriadi, Ichal.. 2014. *Presentasi Asian Network for Free Election Effort to Increase a Public Participation on Elections Notes and Study Case*. Pada

Diah Setiawaty, *MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH MUDA...*

Seminar Publik Peningkatan partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2014. (Makalah tidak diterbitkan).

The Asia Foundation. 2014. *Laporan Naratif Propinsi-propinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Survei Dasar Terhadap Pemahaman, Persepsi, dan Praktik Pemilih Terkait Dengan Aspek Pemilu di Enam Target Propinsi*. Jakarta: Polling Center.

Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Fungsi Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 UU. No. 40 tentang kepemudaan.

Widjanarko Puspoyo. Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009. *Jurnal Perempuan*. Vol. I No. 63 Tahun 2009.

